

HADITH AND GENDER ISSUES: EXAMINING HADITH FROM A GENDER PERSPECTIVE IN ISLAMIC LEADERSHIP**HADIST DAN ISU GENDER: MENGAJI HADIST PERSPEKTIF GENDER DALAM KEPEMIMPINAN ISLAM****Wandi¹, Muhammad Yahya², Eerwin Hafid³**Program Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar^{1,2,3}

*Wandipratama01012003@gmail.com, muh.yahya@uin-alauddin.ac.id

*Corresponding Author

ABSTRACT

This study aims to examine the hadith concerning women's leadership from a gender perspective, particularly the hadith stating, "A people will not prosper if they entrust their affairs to a woman" (Narrated by Al-Bukhari). This study is motivated by the differing views among Muslim scholars regarding the position of women in political leadership. The research employs a qualitative approach using a library research method. Primary data were obtained from hadiths related to women's leadership, particularly those recorded in Sahih Al-Bukhari, while secondary data were collected from books, academic journals, and other relevant scholarly works. Data were gathered through documentation techniques and analyzed using thematic hadith (maudhu'i) and historical-contextual approaches. The findings reveal that the hadith on women's leadership is classified as authentic (sahih) in terms of its chain of transmission (sanad), as it was narrated by reliable transmitters and possesses a continuous chain of narration. However, in terms of its textual content (matan), the hadith is closely related to the socio-political circumstances of the Persian Empire during the appointment of Kisra's daughter as ruler. Therefore, some scholars argue that the hadith should be understood contextually and cannot be used as an absolute prohibition against women holding public leadership positions. From a gender perspective, leadership in Islam emphasizes competence, trustworthiness, justice, and individual capability rather than gender differences. Consequently, women have equal opportunities to assume leadership roles as long as they meet the necessary qualifications and leadership requirements. This study demonstrates that a contextual understanding of hadith provides a more comprehensive perspective on gender issues and leadership in Islam.

Keywords: *hadith, gender, women's leadership, Islamic politics, gender perspective***ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hadis tentang kepemimpinan perempuan dalam perspektif gender, khususnya hadis yang menyatakan bahwa "Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang perempuan" (HR. al-Bukhari). Kajian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai kedudukan perempuan dalam kepemimpinan politik. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Sumber data primer berasal dari hadis-hadis yang berkaitan dengan kepemimpinan perempuan, khususnya yang terdapat dalam Sahih al-Bukhari, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari berbagai buku, jurnal, dan karya ilmiah yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, sementara analisis data menggunakan pendekatan hadis tematik (maudhu'i) dan historis-kontekstual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis tentang kepemimpinan perempuan berstatus sahih dari segi sanad karena diriwayatkan oleh perawi yang terpercaya dan memiliki sanad yang bersambung. Namun, dari segi matan, hadis tersebut memiliki keterkaitan dengan kondisi sosial-politik Kerajaan Persia pada masa pengangkatan putri Kisra sebagai pemimpin. Oleh karena itu, sebagian ulama memandang hadis tersebut bersifat kontekstual dan tidak dapat dijadikan dasar larangan mutlak bagi perempuan untuk menduduki jabatan publik. Dalam perspektif gender, kepemimpinan dalam Islam lebih menekankan pada aspek kompetensi, amanah, keadilan, dan kemampuan seseorang daripada jenis kelaminnya. Dengan demikian, perempuan memiliki peluang yang sama untuk menjadi pemimpin selama memenuhi syarat-syarat kepemimpinan yang dibutuhkan. Kajian ini menunjukkan

bahwa pemahaman hadis secara kontekstual dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif terhadap isu gender dan kepemimpinan dalam Islam.

Kata Kunci: hadis, gender, kepemimpinan perempuan, politik Islam, perspektif gender

1. PENDAHULUAN

Sumber pokok ajaran Islam adalah Al-Qur'an dan Hadis.¹ Di dalam keduanya ditemukan berbagai penjelasan mengenai kedudukan laki-laki dan perempuan sesuai dengan kodrat masing-masing. Keduanya diciptakan sebagai pasangan yang saling melengkapi dalam menjalankan tugas sebagai khalifah di muka bumi.² Konsep khalifah menunjukkan bahwa manusia, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki tanggung jawab untuk mengelola kehidupan dan menegakkan nilai-nilai keadilan sesuai dengan tuntunan Allah Swt dan Rasulullah SAW.³

Konteks khalifatullah fil ardhi secara terminologis, berarti "kedudukan kepemimpinan". Ini berarti bahwa semua manusia, baik laki-laki maupun perempuan diamanahkan menjadi pemimpin. Namun demikian, dan bila dicermati lebih lanjut ternyata ada nash Al-Qur'an maupun hadis yang kelihatannya berdimensi maskulin, dan secara sepintas menyiratkan masalah misogoni. Sementara ajaran Islam, diyakini sebagai rahmat untuk semua manusia tanpa membedakan jenis kelaminnya.

Namun demikian, dalam kajian keislaman sering ditemukan teks-teks keagamaan yang dipahami secara patriarki sehingga menimbulkan perdebatan mengenai posisi perempuan dalam ruang publik,⁴ khususnya dalam bidang kepemimpinan politik. Salah satu hadis yang sering menjadi dasar pembahasan adalah sabda Nabi Muhammad saw.

Artinya:

"Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang perempuan." (HR. al-Bukhari).⁵

Hadis tersebut telah menjadi objek diskusi panjang di kalangan ulama klasik maupun kontemporer.⁶ Sebagian ulama memahami hadis tersebut secara tekstual sebagai larangan perempuan menduduki jabatan politik tertinggi. Sebaliknya, sebagian ulama lainnya memandang bahwa hadits tersebut harus dipahami berdasarkan konteks historis kemunculannya sehingga tidak dapat digeneralisasikan untuk seluruh situasi dan zaman.⁷

Namun Perkembangan masyarakat modern menunjukkan semakin banyak perempuan yang berpartisipasi dalam bidang politik dan pemerintahan. Bahkan sejumlah negara telah berhasil dipimpin oleh perempuan dengan capaian yang signifikan dalam pembangunan dan tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan kajian hadis yang komprehensif dengan pendekatan gender untuk memahami pesan substantif hadis tersebut serta relevansinya terhadap kepemimpinan perempuan dalam konteks kontemporer.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Sumber data primer berupa hadis tentang kepemimpinan perempuan yang terdapat dalam kitab-kitab hadis, khususnya Sahih al-Bukhari. Sementara itu,

¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2012), hlm. 45.

² Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 34.

³ M. Quraish Shihab, *Perempuan* (Tangerang: Lentera Hati, 2018), hlm. 27.

⁴ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 12.

⁵ Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, no. hadis 7099.

⁶ Fatima Mernissi, *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry* (Oxford: Basil Blackwell, 1991), hlm. 119-122.

⁷ Yusuf al-Qardhawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah* (Kairo: Dar al-Syuruq, 1995), hlm. 114-118.

sumber data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan hadis, gender, dan kepemimpinan perempuan dalam Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan berbagai literatur yang relevan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan hadis tematik (maudhu'i) dan pendekatan historis-kontekstual. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah kualitas sanad hadis, memahami latar belakang munculnya hadis (asbabul wurud), serta mengkaji relevansi makna hadis dalam konteks sosial masyarakat modern.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran literatur hadis, ditemukan bahwa hadis mengenai kepemimpinan perempuan diriwayatkan oleh Abu Bakrah dan termuat dalam kitab Sahih al-Bukhari.⁸ Hadis tersebut berbunyi:

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

Artinya:

"Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang perempuan." (HR. al-Bukhari).

Dari hasil penelitian sanad, hadis ini termasuk kategori hadis sahih karena diriwayatkan oleh perawi-perawi yang terpercaya (tsiqah) serta memiliki sanad yang bersambung hingga Rasulullah saw.⁹ Oleh karena itu, dari aspek otentisitas hadis tidak terdapat keraguan mengenai validitas periwayatannya.

Namun demikian, hasil penelitian terhadap matan hadis menunjukkan adanya keterkaitan yang erat dengan konteks sejarah pada masa Nabi Muhammad saw. Hadis tersebut muncul ketika Rasulullah saw. mendengar berita bahwa Kerajaan Persia mengangkat putri Kisra (Buran binti Kisra) sebagai pemimpin setelah wafatnya ayahnya.¹⁰ Pada saat itu kondisi politik Persia sedang mengalami ketidakstabilan akibat konflik internal dan perebutan kekuasaan.

Penelusuran terhadap berbagai literatur tafsir hadis menunjukkan bahwa sebagian ulama memahami hadis tersebut sebagai informasi tentang kondisi sosial-politik tertentu yang terjadi pada masa itu, bukan sebagai ketentuan hukum universal yang berlaku untuk seluruh perempuan di setiap tempat dan waktu.

3.2. Pembahasan

3.2.1. Analisis Hadis Kepemimpinan Perempuan

Dalam studi hadis, pemahaman terhadap suatu hadis tidak cukup hanya dilakukan melalui penelitian sanad, tetapi juga memerlukan kajian terhadap matan dan konteks kemunculannya (asbab al-wurud).¹¹ Meskipun hadis tentang kepemimpinan perempuan berstatus sahih, pemahamannya perlu dilakukan secara komprehensif agar tidak menimbulkan kesimpulan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Menurut ulama klasik seperti Imam al-Tabari dan sebagian ulama kontemporer, hadis tersebut berkaitan dengan kondisi khusus Kerajaan Persia yang saat itu mengalami kemunduran politik. Oleh karena itu, hadis tersebut dipahami sebagai kritik terhadap sistem

⁸ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, no. hadis 7099.

⁹ Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari*, Juz 13 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.), hlm. 53.

¹⁰ M. Al Fatih Suryadilaga, "Pendekatan Historis dalam Memahami Hadis-Hadis Gender," *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 18, no. 2 (2017): 205.

¹¹ Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari*, hlm. 54.

pemerintahan ¹²Persia yang sedang mengalami krisis, bukan sebagai penolakan mutlak terhadap kepemimpinan perempuan¹³

Pendekatan kontekstual ini menegaskan bahwa suatu hadits harus dipahami sesuai dengan latar sosial, budaya, dan politik yang melatarbelakangi kemunculannya. Dengan demikian, pemahaman hadis tidak hanya berhenti pada makna tekstual, tetapi juga memperhatikan tujuan dan pesan substantif yang ingin disampaikan oleh Nabi Muhammad saw.

3.2.2. Perspektif Gender dalam Kepemimpinan Islam

Gender merupakan konstruksi sosial yang membedakan peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Dalam perspektif Islam, kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh ketakwaan dan kualitas amalnya.¹⁴

Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-Hujurat ayat 13:

Terjemahnya:

"Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa."¹⁵

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam mengakui kesetaraan manusia dalam memperoleh kesempatan untuk berkontribusi dalam kehidupan sosial. Kepemimpinan dalam Islam pada dasarnya didasarkan pada kemampuan, amanah, keadilan, dan kompetensi, bukan semata-mata jenis kelamin.

Dalam sejarah Islam juga ditemukan sejumlah perempuan yang memiliki peran strategis dalam kehidupan publik. Aisyah ra., misalnya, dikenal sebagai tokoh intelektual yang menjadi rujukan para sahabat dalam berbagai persoalan keagamaan. Selain itu, Al-Qur'an juga mengisahkan kepemimpinan Ratu Balqis yang berhasil memimpin negerinya dengan kebijaksanaan dan kemampuan diplomasi yang baik.

3.3. Relevansi Hadis dengan Kepemimpinan Perempuan Kontemporer

Perkembangan dunia modern menunjukkan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan, pengalaman organisasi, serta kemampuan profesional dalam berbagai bidang, termasuk politik dan pemerintahan. Banyak negara yang pernah dipimpin oleh perempuan dan mampu mencapai kemajuan dalam pembangunan ekonomi, sosial, maupun demokrasi.¹⁶

Fakta tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kepemimpinan tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh kualitas kepemimpinan yang dimiliki seseorang. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip Islam mengenai amanah, keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan masyarakat menjadi ukuran utama dalam memilih seorang pemimpin.

Dengan demikian, hadis tentang kepemimpinan perempuan tidak dapat dipahami sebagai larangan mutlak bagi perempuan untuk menduduki jabatan publik. Hadis tersebut lebih tepat dipahami sebagai pernyataan yang berkaitan dengan situasi politik tertentu pada masa Nabi Muhammad saw. Adapun dalam konteks masyarakat modern, perempuan dapat menjadi pemimpin selama memiliki kapasitas, integritas, serta kemampuan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas kepemimpinan.¹⁷

¹² Musyafahah, "Reinterpretasi Hadis Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Kontekstual," *Jurnal Living Hadis* 6, no. 1 (2021): 7–12.

¹³ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, hlm. 8.

¹⁴ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 85.

¹⁵ QS. Al-Hujurat [49]: 13.

¹⁶ Siti Wahyuni, "Kepemimpinan Perempuan dalam Politik Islam: Analisis Hadis dan Realitas Sosial," *Jurnal Diskursus Islam* 11, no. 1 (2023): 55–58.

¹⁷ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), hlm. 6–8.

3.4. Implikasi Kajian Hadis terhadap Isu Gender

Kajian hadis dengan perspektif gender memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap teks-teks keagamaan. Pendekatan ini tidak bertujuan menolak hadis, melainkan berusaha memahami pesan moral dan tujuan syariat yang terkandung di dalamnya.¹⁸

Melalui pendekatan tersebut dapat dipahami bahwa Islam tidak mendiskriminasi perempuan dalam bidang kepemimpinan. Sebaliknya, Islam memberikan ruang yang luas bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik selama tetap memperhatikan nilai-nilai etika dan tanggung jawab yang diajarkan agama.¹⁹

Maka dari itu, isu kepemimpinan perempuan dalam Islam hendaknya dipandang secara proporsional dengan mempertimbangkan aspek historis, sosial, dan substansi ajaran Islam yang menjunjung tinggi keadilan serta kemaslahatan umat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa hadis tentang kepemimpinan perempuan yang berbunyi "Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang perempuan" (HR. al-Bukhari) merupakan hadis yang berstatus sahih dari segi sanad karena diriwayatkan oleh perawi-perawi yang terpercaya dan memiliki sanad yang bersambung hingga Rasulullah saw. Oleh karena itu, keabsahan hadis tersebut tidak diragukan dalam kajian ilmu hadis.

Namun, dari segi matan dan konteks historisnya, hadis tersebut berkaitan erat dengan kondisi sosial-politik Kerajaan Persia pada masa pengangkatan putri Kisra sebagai pemimpin setelah wafatnya ayahnya. Dengan demikian, sebagian ulama memahami hadis tersebut sebagai respon terhadap situasi politik tertentu, bukan sebagai larangan mutlak dan universal terhadap kepemimpinan perempuan dalam semua ruang dan waktu.

Dalam perspektif gender, Islam menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai manusia yang memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah Swt., sementara kemuliaan seseorang ditentukan oleh ketakwaan, kompetensi, amanah, dan kualitas amalnya. Oleh karena itu, kepemimpinan dalam Islam pada dasarnya tidak semata-mata didasarkan pada jenis kelamin, melainkan pada kemampuan, integritas, keadilan, dan tanggung jawab yang dimiliki seseorang.

Relevansi hadis tersebut dalam konteks kontemporer menunjukkan bahwa perempuan memiliki peluang yang sama untuk menduduki jabatan publik dan posisi kepemimpinan selama memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Pemahaman hadis secara historis-kontekstual memberikan pandangan yang lebih komprehensif dan proporsional terhadap isu gender, sehingga nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan kesetaraan yang menjadi tujuan utama ajaran Islam dapat terwujud dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

5. DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Al-Asqalani, Ibn Hajar. Fath al-Bari bi Syarh Sahih al-Bukhari. Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.

Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail. Sahih al-Bukhari. Beirut: Dar Ibn Kathir, 2002.

Al-Qardhawi, Yusuf. Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah. Kairo: Dar al-Syuruq, 1995.

Aminah, Siti. "Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hadis dan Gender." *Jurnal Studi Hadis* 6, no. 2 (2020): 145–160.

¹⁸ Muhammad Anshori, "Pemahaman Kontekstual Hadis tentang Kepemimpinan Perempuan," *Jurnal Living Hadis* 6, no. 1 (2021): 85–89.

¹⁹ Siti Aminah, "Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hadis dan Gender," *Jurnal Studi Hadis* 6, no. 2 (2020): 150–154

- Anshori, Muhammad. "Pemahaman Kontekstual Hadis tentang Kepemimpinan Perempuan." *Jurnal Living Hadis* 6, no. 1 (2021): 75–92.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Hidayati, Nur. "Reinterpretasi Hadis Misoginis dalam Perspektif Keadilan Gender." *Jurnal Studi Gender dan Islam* 15, no. 2 (2021): 120–138.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Mernissi, Fatima. *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry*. Oxford: Basil Blackwell, 1991.
- Musyafahah, Nur. "Reinterpretasi Hadis Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Kontekstual." *Jurnal Living Hadis* 6, no. 1 (2021): 1–18.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
- Saidah, Nur. "Perempuan dan Kepemimpinan Politik dalam Islam." *Jurnal Al-Ulum* 19, no. 1 (2019): 95–112.
- Shihab, M. Quraish. *Perempuan*. Tangerang: Lentera Hati, 2018.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- Suryadilaga, M. Alfatih. "Pendekatan Historis dalam Memahami Hadis-Hadis Gender." *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 18, no. 2 (2017): 201–220.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 2001.
- Wahyuni, Siti. "Kepemimpinan Perempuan dalam Politik Islam: Analisis Hadis dan Realitas Sosial." *Jurnal Diskursus Islam* 11, no. 1 (2023): 45–63.